

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KAMPUNG KB) DI KABUPATEN NIAS UTARA

Exaudi Telaumbanua¹, R.Kintoko Rochadi², Otniel Ketaren³, Evawani M Silitonga⁴,
Janno Sinaga⁵, Taruli Rohana Sinaga⁶

Universitas Sari Mutiara Indonesia

evawani.martalena@gmail.com¹, sinagajano@gmail.com²

ABSTRACT

The lack of optimal development in the KB Village that has been formed in North Nias Regency is caused by many factors, including the lack of the existing budget (government policy) in supporting the KB village program, lack of facilities and infrastructure (there is no secretariat for the KB village working group), Lack of awareness (participation) The community in carrying out the KB village program and the minimal role of family resilience in KB village activities. The type of research used in this study is a type of research with a qualitative approach. The planned informants include the P2AP2KB Office, PLKB, Village Heads, KB Village Working Group Management and some from the community. Understanding how to explore the implementation of the KB Village Program in North Nias Regency in 2020. This research was conducted in May 2020 and the research location was aimed at a place where the KB Village is not optimal in carrying out the Family Planning Village Program activities. Data collection techniques in this study are: Focus Group Discussion (FGD), Interview, Documentation, Observation. The results of the study are the absence of policies taken by the Regional Government of North Nias Regency in the KB Village activity program, the absence of the provision of facilities and infrastructure that can be provided from the village government, the low awareness of the community in carrying out the Kampung KB program activities, the influence of policies, participation, facilities and infrastructure and family resilience are very influential in the success of the Kampung KB program activities. The suggestion in this study is that it is hoped that the Regional Government of North Nias Regency can make a policy that can be useful in the activities of this KB Village Program so that the Village Government can boldly carry out tasks and functions in the KB Village Program.

Keywords : KB Village Program Implementation

ABSTRAK

Belum optimalnya perkembangan di Kampung KB yang telah terbentuk di Kabupaten Nias Utara disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya anggaran yang ada (kebijakan pemerintah) dalam mendukung program kampung KB, kurangnya sarana dan prasarana (belum ada sekretariat kelompok kerja kampung KB), Kurangnya kesadaran (partisipasi) Masyarakat dalam menjalankan program Kampung KB dan minimnya peran ketahanan keluarga dalam kegiatan kampung KB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif. Informan yang direncanakan antara lain Dinas P2AP2KB, PLKB, Kepala Desa, Pengurus Pokja Kampung KB dan Sebagian dari Masyarakat. Memahami bagaimana Mengeksplorasi Implementasi Program Kampung KB di Kabupaten Nias Utara penelitian ini pada bulan Mei 2020 dan Tempat penelitian ditujukan pada tempat yang memang tempat tersebut kurang optimal dalam melakukan kegiatan Program Kampung KB. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Fokus Group Diskusi (FGD), Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Hasil penelitian adalah belum adanya Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara dalam program kegiatan Kampung KB, belum adanya penyediaan Sarana dan Prasarana yang dapat diberikan dari Pemerintahan Desa, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan program Kampung KB, pengaruh dari kebijakan, partisipasi, sarana dan prasarana serta ketahanan keluarga sangatlah berpengaruh besar dalam menyukkseskan kegiatan program Kampung KB, Saran dalam penelitian ini adalah Maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara dapat membuat

suatu Kebijakan yang dapat berguna pada kegiatan Program Kampung KB ini sehingga Pemerintahan Desa dapat dengan berani melakukan tugas-tugas serta fungsi dalam Program Kampung KB tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Program Kampung KB

PENDAHULUAN

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini baik yang menyangkut jumlah, kualitas maupun persebarannya merupakan tantangan yang berat yang harus diatasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan yang ada pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitasnya melalui Program Keluarga Berencana. (statistik rutin BKKBN 2019)

Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi presiden RI, terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, terutama dalam integritas kegiatan yang akan dilaksanakan di kampung KB.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh dilini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang dilingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementerian atau Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) diseluruh Kabupaten/Kota.

Kampung KB telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, untuk kelanjutannya BKKBN berkerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti pengembangan Kampung KB. Diharapkan pada tahun 2017 setiap kecamatan mengembangkan minimal 1 (satu) Kampung KB.

Pembangunan keluarga sejahtera maknanya identik dengan pengentasan kemiskinan, karena tujuannya sama meningkatkan derajat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Secara sederhana keluarga itu akan sejahtera, apabila bebannya tidak berat, ekonominya kuat, dan ketahanannya mantap. Program pembangunan keluarga yang terakumulasi dalam Baga Kencana dengan empat pokok garapan yaitu pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ditambah dengan pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggi (2021) Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi program berhasil apabila pemerintah, pokja, lintas sektor dan masyarakat berperan dan bekerjasama dengan maksimal. Keberadaan Kampung KB sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kurangnya kerjasama dengan lintas sektor.

Ariani (2018) meneliti tentang implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pencerdasan program KB

melalui adanya kampung KB. Dan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara diketahui bahwa persentase peserta KB aktif sebesar 59,29% (9.233 dari 15.572 PUS). Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta KB aktif di Kabupaten Nias Utara masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rendahnya persentase peserta KB aktif di Kabupaten Nias Utara disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana di Kabupaten Nias Utara yang berjumlah 30 orang sedangkan jumlah desa dan kelurahan berjumlah 113. Untuk meningkatkan kesertaan ber-KB ini Kabupaten Nias Utara juga ikut berpartisipasi dengan gerakan nasional dengan menetapkan kampung KB di Kabupaten Nias Utara melalui Surat Keputusan Bupati Nias Utara. Sampai tahun 2020, Kabupaten Nias Utara telah mencanangkan 29 Kampung KB di 11 Kecamatan. Tahun 2016 sebanyak 1 Kampung KB yaitu Desa Moawo Kecamatan Lahewa, Tahun 2017 sebanyak 11 desa (1 desa per kecamatan) dan pada tahun 2018 sebanyak 17 Kampung KB.

Peserta KB di Provinsi Sumatera Utara tersebar di 33 Kabupaten/Kota dengan persentase terbesar di Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah 45.284 dari 53.965 (83,91%) yang disusul dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan jumlah 75.675 dari 93.099 PUS (81,28%) sedangkan Kabupaten yang persentasenya terendah Kabupaten Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Asahan. (statistik rutin BKKBN 2019)

Tujuan penelitian ini adalah melihat Bagaimanakah hubungan kebijakan, sarana prasarana, kesadaran masyarakat dan ketahanan keluarga dengan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara, letaknya tepat dalam ibu kota Kabupaten Nias Utara. Namun fokus penelitian ini pada Desa yang telah terbentuk Kampung KBnya di Wilayah Kabupaten Nias Utara, adapun beberapa sasaran responden dalam penelitian ini adalah 2 orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara, 2 Orang PLKB dari Kampung KB, 5 Orang dari Kepala Desa Kampung KB, 5 Orang dari Pengurus POKJA Kampung KB, dan 5 Orang Masyarakat dari Kampung KB tersebut dan penelitian ini dilaksanakan pada wilayah masing masing Kampung KB yang telah peneliti pilih sebagai sasaran responden dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam terhadap informan, sesuai bidang masing-masing menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara narasi.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:270) meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL

Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa berdasarkan beberapa definisi tentang Kebijakan Publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi

publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada hasil penelitian yang telah dilakukan dimana ditemukan tidak adanya kebijakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaan Program kegiatan Kampung KB tidak dapat oleh pemerintahan desa sebab harus menunggu dikeluarkannya kebijakan dari pemerintahan daerah.

Dari penelitian lainnya juga ada beberapa kendala yang dihadapi baik itu dari BKKBN maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi, antara lain mengenai anggaran, seperti yang dikatakan Ibu Vivi Vaulina pada saat wawancara bahwa anggaran masih dipegang BKKBN Kaltim karena BKKBN Kalimantan Utara masih dalam persiapan terkhusus untuk Kampung KB sendiri, selain itu anggaran juga berasal dari dana APBN di mana anggaran itu sangat berbeda dari anggaran APBD yang harga-harganya jauh lebih murah dari dana APBN. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh enawati (2014) tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyuluhan program keluarga berencana. Namun terkadang hal ini terkendala akibat kebijakan oleh dinas terkait mengenai aturan yang cukup sulit untuk selalu diterapkan.

Sarana dan Prasarana dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara

Prinsip –prinsip dalam pembentukan Kampung KB adalah sebagai berikut: Kampung KB merupakan istilah yang baku (tidak diganti dengan istilah yang lain), Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB, Dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga, Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program KKBPK dengan lintas sector terkait, Merupakan gerakan yang di prakarsai masyarakat.

Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan dalam hal sarana dan prasarana yang ada untuk sampai saat ini masih belum ada disebabkan dalam pengadaan bahan sarana dan prasarana tersebut sebenarnya disediakan oleh Kampung KB itu sendiri namun dalam penyediaan sarana yang diberikan dari Dinas P2AP2KB adalah dalam bentuk layanan penyuluhan.

Dalam penelitian lain juga diperoleh hal sebagai berikut kendala-kendala lain berupa proses pembinaan di mana letak desa-desa yang memenuhi syarat dibentuknya kampung KB itu sangat jauh, jadi transportasi lebih mahal dan belum lagi jalan dan jembatan yang belum terbentuk sempurna sehingga menghambat proses pembinaan kampung kb itu sendiri. Untuk kendala di masyarakat sendiri belum bisa dirasakan karena kampung kb ini juga baru di desa mereka dan saat ini masyarakat masih mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kampung KB serta masih tahap pembenahan desa dengan adanya kampung KB ini.

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya.

Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Kampung KB sangatlah tinggi namun kegiatan ini dengan sendirinya menemui kebuntuan arah oleh sebab beberapa masyarakat merasa perlu adanya dukungan yang diperlukan dalam melakukan segala aktivitas pada Kampung KB. pelaksanaan Program Kampung KB ditingkat Desa masih belum berjalan sebab kami dari desa tidak dapat melakukan kegiatan dan memerintahkan para pengurus POKJA untuk melaksanakan kegiatan berhubung tidak ada alokasi dana yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut, namun apabila ada petunjuk dari pemerintahan daerah tentang alokasi dana desa untuk kegiatan Kampung KB maka kami selaku kepala Desa turut mendukung kegiatan tersebut. Supaya tercapai apa petunjuk yang diharapkan dari Bapak Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian lain juga diperoleh hasil dengan beberapa informan baik Dinas terkait dalam pembentukan Kampung KB maupun warga Desa Jelarai sendiri, bahwa informasi mengenai Program Kampung KB ini disampaikan dengan baik dan dapat diterima di masyarakat, bisa kita lihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama adanya Kampung KB dan warga pun mengetahui tujuan dari pembentukan Kampung KB ini untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Dan informasi ini memiliki kejelasan dengan adanya amanat Presiden Jokowi, Agenda Nawacita serta perda-perda dalam pembentukan Kampung KB itu sendiri, serta informasi yang konsisten dalam penyampaian ini.

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi social.

Namun yang dapat kita rasakan yang terjadi dimasyarakat adalah dimana petunjuk pelaksanaan 8 fungsi keluarga dari Dinas P2AP2KB telah di sosialisasikan namun masih menemui masih banyak kendala yang hadapi dilapangan dimana pelaksanaan kegiatan 8 seksi Program Kampung KB tidak dapat berjalan disebabkan karena tidak adanya sumber dana dan lain hal yang berkaitan. Sehingga arti dari pada ketahanan keluarga itu sendiri dalam lingkup Kampung Kb tidak begitu Nampak dan tidak adanya perbedaannya dengan desa desa yang belum terpilih Kampung KB.

Dalam penelitian lainnya juga berpendapat bahwa dengan adanya Kampung KB ini ada peningkatan-peningkatan yang sudah dirasakan terkhusus respon masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung KB seperti persiapan kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan kunjungan Kepala BKKBN RI, mengikuti program BKL, BKB, BKR serta UPPKS di mana semua kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera, dan untuk desanya sendiri agar menjadi Desa Ideal atau minimal Desa sejahtera yang mana masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan primer mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari Kebijakan public terhadap Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara Maka diperoleh hasil dimana belum adanya Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara dalam program kegiatan Kampung KB.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari Ketersediaan Sarana prasarana atau fasilitas terhadap Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten

Nias Utara Diperoleh hasil yaitu belum adanya penyediaan Sarana dan Prasarana yang dapat diberikan dari Pemerintahan Desa oleh sebab belum adanya petunjuk juknis dari Pemerintahan Daerah sehingga Desa Kampung KB yang terpilih tidak berani mengadakan dan menyediakan sarana dan Prasarana namun untuk kegiatan selama ini yang telah dilakukan seperti penyuluhan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara Pemerintahan Desa hanya dapat menyediakan Tempat sebagai tempat terlaksananya kegiatan tersebut

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari Mengidentifikasi hubungan Kesadaran Masyarakat terhadap Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara Dapat diperoleh hasil dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan program Kampung KB dimana banyak hal yang menjadi faktor pendukungnya yang menjadi rendahnya kesadaran masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah juga merupakan motor utama dalam melaksanakan kegiatan Kampung KB agar Pemerintahan Desa punya Kekuatan hukum dalam memberikan dukungan terhadap Pengurus POKJA Kampung KB atau sebagai penyengat masyarakat dalam mengikuti kegiatan program Kampung KB.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari Mengidentifikasi hubungan Ketahanan Keluarga terhadap Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) di Kabupaten Nias Utara dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat kita simpulkan bahwa pengaruh dari kebijakan, partisipasi, sarana dan prasarana serta ketahanan keluarga sangatlah berpengaruh besar dalam menyukseskan kegiatan program Kampung KB, dimana terlaksananya kegiatan Program Kampung KB tak lepas dari peran serta keluarga masing yang dalam hal ini elemen masyarakat juga

merasa punya beban dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing terutama dalam menerapkan 8 fungsi keluarga yang penerapan tersebut dapat di peroleh dan diaplikasikan dari kegiatan Program Kampung KB dari hal tersebut ketahanan keluarga dapat terbentuk namun dengan banyaknya hambatan ini mengaplikasikan hal tersebut sangatlah sulit dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada bapak/ibu yang bekerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Utara, di kabupaten Nias Utara yang telah meluangkan banyak waktu serta tenaga untuk membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dr. Dwi Listyawardani, Ir.,M.Sc. (2018). *Pedoman Pengelolaan Kampung KB*.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu., (1990). *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S., (2003). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Soetomo., (2006), *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun (2009) tentang *Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga*.
- Jurnal Keluarga. (2017). *Angka Angka Sukses di Sidang New York*. Edisi Kedua